

## ABSTRACT

Zulkarnain, "The change of Dudok Setikorgh Council Role in the Process of Taking Decision according to the clan of Tamiang Custom" (A Study About Foklore in Tamiang Society). Thesis Program Pasca Sarjana, State University of Medan, February, 2010.

The ethnic group of Tamiang has a non formal lague to take decision which involved greatly the people participation in doing the village government as it called "*Majelis Dudok Setikorgh*" (MDSK). Throught the appropriated people group (prominent people) who sit in the program of MDSK who represent the voice of people arranged by the a democratic way. They views the demokratic's value (democraton reffesentative) has fulfilled the condition of the living in community and in a nation in avery concerned way. In this system the elements of villages government consist of chief of village (Datok Penghulu), Chief of religion matter (Tok Imam) and appropriated people (Urghang Patut-patut) to reprintsent people. In permanently and it's number always be odd number. The impermanental of this group because this system more appreciate the ability of profesionalism rather than individual expertation of people delegation in collecting their voice maximumly. Based on the MDSK guide book issued by Secretary of Aceh Tamiang which has changed the role of *Majelis Dudok Setikorgh*, it will be made as a permanent institusion so that it can bring the exchange in the proses of talking the decision and it's role functioned in the village government which is not accordance whith basic of custom law and other institutions which hand out decision talking for the village government nowadays suitable white Undang-undang Otanomi Daerah Nomor 12/1999.

Research propose: to indentificate of to the contribute the democratic values through the other arranged by *Majelis Dudok Setikorgh*, and the great view of those who have be came the appropriated people with their contribute to the government of Aceh Tamiang, and this also aim to find out the relationship and social influence due to the change of role MDSK in the proses of talking decision for the village government nowadays.

This is kind of the research chosen is descriptive qualitative described deductively. The technique of data collecting was done by studying literatures and field observations. The data is collected through structured interviews. Technique of data analysis is done through of tree phases, that are: reduction of data, presentation of data and conclution/verification of data.

The result of research found the change of role of MDSK as a mechanism of setting the other of law in society as it called as "tertib majelis" (council order) has changed role and function of chief of village in Tamiang, *Tok Imam* and *Urghang Patut-patut*. The influence has been felt by people that at present they feel the role of people's reffesentative (the appropriated people/*Urghang Patut-patut*) so be can very effective to change democratic value based on custom. The consequence is the people participation become weak in depeleving villages in Aceh Tamiang nowadays

## ABSTRAK

Zulkarnain, "Perubahan Peran *Majelis Dudok Setikorgh* Dalam Proses Pengambilan Keputusan Menurut Adat Budaya Perkauman Suku Tamiang (Studi Tentang *Foklore* Dalam Masyarakat Suku Tamiang)". Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Medan, Pebruari 2010.

Perkauman Suku Tamiang memiliki wahana proses pengambilan keputusan yang melibatkan sebesar-besarnya partisipasi rakyat di dalam pemerintahan kampung, yakni *Majelis Dudok Setikorgh* (MDSK). Melalui golongan *Urghang Patut-Patut* yang duduk di dalam acara *Majelis Dudok Setikorgh* mewakili suara rakyat serta *tertib majelis* yang disusun secara musyawarah, mereka memandang nilai-nilai demokrasi perwakilan (*democratisation representative*) telah memenuhi wujud tertib sosial yang adaptif bagi kelangsungan tatanan bermasyarakat dan bernegara secara mufakat. Di dalam sistem ini unsur pemerintahan kampung hanya terdiri dari Datok Penghulu, Tok Iman dan Urghang Patut-Patut yang mewakili rakyat secara tidak permanent dan jumlahnya selalu ganjil. Tidak permanennya golongan ini karena sistem ini lebih menghargai kemampuan profesionalisme individu yang akan mewakili suara rakyat dari pada keahlian wakil rakyat dalam mengumpulkan suara terbanyaknya. Berdasarkan Buku Panduan MDSK yang dikeluarkan oleh Sekdakab, Aceh Tamiang telah mengubah peran *Majelis Dudok Setikorgh*, menjadikannya suatu lembaga permanent sehingga membawa perubahan dalam proses pengambilan keputusan serta peran dan fungsi unsur-unsur pemerintahan kampung yang belum sesuai dengan dasar-dasar hukum adat dan lembaga-lembaga pengambil keputusannya seperti yang dimaksud oleh UU Otonomi Daerah Nomor 12/1999.

Penelitian bertujuan: untuk mengidentifikasi sumbangan nilai-nilai demokrasi melalui *tertib majelis* yang disusun oleh *Majelis Dudok Setikorgh*, dasar pandangan besarnya peran Urghang Patut-patut bagi pemerintahan berdasarkan adat Tamiang, serta menemukan hubungan dan pengaruh sosial akibat perubahan peran *Majelis Dudok Setikorgh* dalam proses pengambilan keputusan bagi pemerintahan kampung dewasa ini.

Jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif yang diuraikan secara deduktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan literatur dan observasi lapangan. Data juga dikumpulkan melalui wawancara berstruktur. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan peran MDSK sebagai mekanisme dalam menetapkan tata aturan dalam masyarakat yang disebut dengan "*tertib majelis*", telah mengubah peran dan fungsi Datok sebagai kepala Pemerintahan Kampung di Tamiang, Tok Imam, dan Urghang Patut-patut. Dampak sosial yang dirasakan adalah berkurangnya peran wakil rakyat (Urghang Patut-patut), merubah nilai berdemokrasi yang sesuai adat. Konsekwensinya adalah melemahnya partisipasi rakyat yang berkualitas dalam pembangunan kampung-kampung di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dewasa ini.